

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021

1. Nama Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
2. Tugas :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana , penanganan darurat , rehabilitasi , serta rekonstruksi secara adil dan setara
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang –undangan
 3. Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 4. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
 2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh

4. Indikator kinerja Utama (IKU)

No	SASARAN	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	ALASAN / SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas Sumber Daya dan Pelayanan Aparatur Yang Handal dan tangguh dilingkungan BPBD Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Aparatur dan masyarakat yang mengikuti bintek relawan dan aparaturn penanggulangan bencana . 2. Persentase PNS Terlatih yang telah memanfaatkan hasil bintek / kursus 	RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jambi
2	Meminimalisir Kerugian Akibat Bencana Dengan Melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Aparatur BPBD / Kesbangpol dan Linmas Kab/kota yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-undang Penanggulangan Bencana (PB) 2. Tersedianya Peta dan protap kebencanaan 3. Persentase kab/kota yang telah memanfaatkan hasil sosialisasi daerah rawan bencana 4. Terbentuknya tim pengarah Penanggulangan bencana 5. Tersedia rencana aksi daerah penanggulangan bencana provinsi Jambi 6. Persentase kab/kota yang telah memanfaatkan hasil sosialisasi PB terhadap organisasi . 7. Persentase aparaturn BPBD/ Kesbangpol & linmas kab/kota yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan ,masyarakat PB 8. Tersedia leaflet dan poster pencegahan dan kesiapsiagaan 	RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jambi
3	Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat , tepat efektif dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparaturn / tenaga BPBD / Kesbangpol & Linmas kab/kota dididik sebagai tim 	RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jambi

	efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana	<p>Reaksi Cepat(TRC) dalam penanganan darurat bencana.</p> <p>2. Persentase aparat BPBD/Kesbangpol & Linmas kab/kota yang telah memanfaatkan hasil kegiatan bintek pementapan manajemen logistik.</p> <p>3. Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi BPBD Kab/Kota se Provinsi Jambi dan penyediaan bahan logistik.</p> <p>4. Tersedia peralatan dan perlengkapan TRC (Tim reaksi cepat) dan sarana bencana.</p>	
4	Terwujudnya pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB) yang handal dalam upaya membangun system informasi , komando dan koordinasi penanggulangan bencana Provinsi Jambi	<p>1. Persentase Aparatur BPBD / Kesbangpol & Linmas Kab/kota yang telah memanfaatkan hasil kegiatan sosialisasi pedoman dan protap PUSDALOPS PB.</p> <p>2. Persentase Aparatur BPBD / Kesbangpol & Linmas kab/kota yang telah mengikuti kegiatan diklat manajemen Pusdalops PB.</p> <p>3. Persentase pemanfaatan simulasi penanganan darurat bagi masyarakat</p>	RPJMD dan renstra BPBD Provinsi Jambi
5	Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Persentase Aparatur BPBD/ Kesbangpol & Linmas Kab/kota yang telah memanfaatkan hasil kegiatan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak lain	RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jambi

		<p>dalam penanganan pasca bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah aparatur BPBD/kesbangpol & Linmas Kab/kota & Linmas kab/kota yang dididik dan mengikuti diklat teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana. 3. Persentase Aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas kab/kota yang telah mengikuti kegiatan sinkronisasi rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana. 4. Tersedianya buku pedoman pembuatan type rumah tahan gempa. 5. Presentase Aparatur BPBD/Kesbangpol & Linmas Kab/Kota yang telah memanfaatkan hasil kegiatan sosialisasi pembangunan rumah tahan gempa . 	
6	<p>Terwujudnya koordinasi sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan, bencana serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana (PB). 2. Presentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi penanggulangan bencana daerah provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di provinsi jambi 	<p>RPJMD dan Renstra BPBD Provinsi Jambi .</p>

		3. Presentase realisasi capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan. 4. Tersedianya RENSTRA BPBD yang dijadikan pergub .	
--	--	--	--

Jambi, Januari 2019
Diketahui Oleh :
Kepala Pelaksana

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720622 200012 1 002

5.2/I/2017

Lampiran III :
Surat Nomor : S-079/Bappeda-

Tanggal : 16 Januari 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan , dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP,M.A
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi .

Pihak kedua
GUBERNUR JAMBI

Jambi, Januari 2018
Pihak pertama
KEPALA PELAKSANA

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP,M.A

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda